



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 176 /2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN STANDAR BIAYA UMUM DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum di Desa, perlu menetapkan Besaran Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *30 Desember 2025*.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKUA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Seluruh camat se-Kabupaten Tabalong.
5. Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 516 /2025
TANGGAL 30 Desember 2025

RINCIAN BESARAN STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa (PKPKD)	OB	Rp500.000,-
2.	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)/ Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) :		
	a. Sekretaris Desa	OB	Rp450.000,-
	b. Kepala Urusan Keuangan (perbendaharaan)	OB	Rp750.000,-
	c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi (PKA)	OB	Rp400.000,-

Keterangan:

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala desa bertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangan desa;
2. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada PPKD dan TPK;
3. PKPKD/PPKD menerima honorarium selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan TPK dibayar per paket kegiatan, kecuali kepala urusan keuangan sebagai fungsi kebendaharaan honorarium yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan;
4. PPKD yang juga merangkap sebagai TPK, dapat menerima honorarium sebagai TPK paling banyak 2 (dua) paket kegiatan.

B. HONORARIUM PENGELOLA ASET DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa (PKPAD)	OB	Rp400.000,-
2.	Sekretaris Desa (Pembantu Pengelola Aset Desa)	OB	Rp350.000,-
3.	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan (Petugas/Pengurus Aset Desa)	OB	Rp300.000,-

Keterangan:

Honorarium Pengelolaan Aset Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Aset Desa (PKPAD) dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa diberikan selama 10 (sepuluh) bulan dan untuk Kepala Urusan Umum dan Perencana selaku Petugas/Pengurus Aset Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

C. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Honorarium Ketua TPK :		
	a. nilai pagu dana s.d. Rp50.000.000,-	OK	Rp500.000,-
	b. nilai pagu dana diatas Rp50.000.000,- s.d. Rp100.000.000,-	OK	Rp600.000,-

	c. nilai pagu dana diatas Rp100.000.000,- s.d. Rp250.000.000,-	OK	Rp700.000,-
	d. nilai pagu dana diatas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,-	OK	Rp800.000,-
	e. nilai pagu dana lebih dari Rp500.000.000,-	OK	Rp1.000.000,-
2.	Honorarium Sekretaris TPK : a. nilai pagu dana s.d. Rp50.000.000,- b. nilai pagu dana diatas Rp50.000.000,- s.d. Rp100.000.000,- c. nilai pagu dana diatas Rp100.000.000,- s.d. Rp250.000.000,- d. nilai pagu dana diatas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,- e. nilai pagu dana lebih dari Rp500.000.000,-	OK OK OK OK OK	Rp350.000,- Rp450.000,- Rp550.000,- Rp650.000,- Rp850.000,-
3.	Honorarium Anggota TPK : a. nilai pagu dana s.d. Rp50.000.000,- b. nilai pagu dana diatas Rp50.000.000,- s.d. Rp100.000.000,- c. nilai pagu dana diatas Rp100.000.000,- s.d. Rp250.000.000,- d. nilai pagu dana diatas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,- e. nilai pagu dana lebih dari Rp500.000.000,-	OK OK OK OK OK	Rp250.000,- Rp350.000,- Rp450.000,- Rp550.000,- Rp750.000,-

Keterangan :

1. Honorarium TPK paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan yang dikelola;
2. Honorarium diberikan kepada Anggota TPK yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dan melalui penyedia barang/jasa (pihak ketiga) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Honorarium Anggota TPK diberikan per paket kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening belanja modal pada setiap kegiatan yang dikelolanya; dan
4. Tenaga Teknis/Tim Pendukung.

Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah desa dimana memerlukan keahlian khusus, maka dapat melibatkan tenaga pendamping profesional.

D. HONORARIUM TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM TINGKAT DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	PERATURAN DESA		
	a. penanggungjawab	OK	Rp500.000,-
	b. ketua	OK	Rp350.000,-
	c. sekretaris	OK	Rp300.000,-
	d. anggota	OK	Rp250.000,-
2.	PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA		
	a. penanggungjawab	OK	Rp500.000,-
	b. ketua	OK	Rp350.000,-
	c. sekretaris	OK	Rp300.000,-
	d. anggota	OK	Rp250.000,-
3.	PERATURAN KEPALA DESA		
	a. penanggungjawab	OK	Rp350.000,-
	b. ketua	OK	Rp300.000,-
	c. sekretaris	OK	Rp250.000,-

d. anggota	OK	Rp200.000,-
------------	----	-------------

Keterangan:

1. Jumlah tim penyusun peraturan Produk Hukum tentang Desa adalah ganjil.
2. Tim penyusun peraturan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
3. Tim penyusun Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa berjumlah 7 (tujuh) s.d. 11 (sebelas) orang.
4. Tim penyusun Peraturan Desa selain angka 3 (tiga) diatas berjumlah 5 (lima) s.d. 7 (tujuh) orang.
5. Tim penyusun Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa berjumlah 5 (lima) s.d. 7 (tujuh) orang.
6. Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun.

E. INSENTIF DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar Keagamaan milik atau yang dikelola oleh pemerintah desa	OB	Rp400.000,-
2.	Insentif Petugas Perpustakaan Desa	OB	Rp400.000,-
3.	Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	OB	Rp150.000,-
4.	Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp150.000,-
5.	Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp150.000,-
6.	Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp150.000,-
7.	Insentif Kader PIK Remaja	OB	Rp150.000,-
8.	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp400.000,-
9.	Insentif Rukun Tetangga (RT)	OB	Rp750.000,-

Keterangan:

1. Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar Keagamaan tidak boleh dibayarkan untuk Guru PNS/ yang telah menerima sertifikasi dan honor dari Pemerintah Daerah.
2. Insentif Petugas Perpustakaan Desa diberikan dalam hal tersedia gedung/ruangan pustaka desa dan tersedia buku pustaka serta perpustakaan desa sudah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan.
3. Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu diberikan dalam rangka mendukung program Posyandu 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Kader Posyandu meliputi Kader PHBS dan Kader Posbindu.
4. Insentif Rukun Tetangga (RT) adalah bantuan untuk operasional Lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
5. Ketua Rukun Tetangga dapat menerima jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
6. Jaminan Ketenagakerjaan Ketua Rukun Tetangga dibayarkan sebagai premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli desa atau dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

7. Dikecualikan pembayaran insentif dan jaminan ketenagakerjaan Rukun Tetangga yang berada di bawah koordinasi kelurahan.

F. HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DAN KEMAMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Petugas Kebersihan Kantor Desa	OB	Rp500.000,-
2.	Jaga Malam/Wakar Kantor Desa	OB	Rp750.000,-

Keterangan:

1. Penetapan besaran honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
2. Penetapan petugas kebersihan kantor Desa hanya boleh ditetapkan 1 (satu) orang.
3. Penetapan jaga malam/wakar kantor Desa hanya boleh ditetapkan 1 (satu) orang.

G. BELANJA PELATIHAN/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP/ DAN SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Honor Narasumber Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan Desa : a. Eselon II b. Eselon III kebawah/yang disetarakan c. Tenaga Ahli bersertifikat d. Moderator e. Pembawa Acara (Honor narasumber tersebut adalah total keseluruhan dari yang dianggarkan oleh desa-desa yang melaksanakan)	OJ OJ OJ OK OK	Rp1.000.000,- Rp900.000,- Rp900.000,- Rp400.000,- Rp250.000,-
2.	Honor Rohaniwan	OK	Rp250.000,-
3.	Honor Panitia Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya, jumlah panitia maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta desa: a. ketua b. sekretaris c. anggota	OK OK OK	Rp400.000,- Rp350.000,- Rp300.000,-
4.	Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang dilaksanakan di hotel : a. full day b. half day c. full board harga sudah termasuk pajak	OHP OHP OHP	Rp475.000,- Rp340.000,- Rp1.219.000,-
5.	Uang saku/harian peserta Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya		Memakai Indeks Biaya Perjalanan

			Dinas/uang transport.
--	--	--	-----------------------

Keterangan:

1. Honorarium narasumber dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi kegiatan.
2. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
3. Satuan jam pelajaran (JP) yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit.
4. Narasumber dengan ketentuan:
 - a. berasal dari lembaga pemerintah yang berkompeten;
 - b. berasal dari Badan/Lembaga Non Pemerintah yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian/ Lembaga Negara yang membidangnya; dan
 - c. melampirkan paparan/ materi yang akan disampaikan.
5. Honorarium Panitia yang diberikan kepada Anggota Panitia yang diberi tugas oleh Kepala Desa/Perwakilan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas kegiatan seminar/sosialisasi/bimbingan teknis/penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
6. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan tambahan panitia yang berasal dari ASN yang berada pada kantor kecamatan harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk Panitia.
7. Uang saku peserta yang diberikan untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan sejenisnya mengacu pada indeks biaya perjalanan dinas apabila pelaksanaannya di luar desa yang bersangkutan, dan apabila kegiatan dilaksanakan di desa setempat maka tidak diberikan uang saku dikecualikan bagi peserta dari unsur masyarakat diluar aparaturnya pemerintahan desa dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 75.000,-/hari.

H. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Biaya snack/camilan harian aparat desa	OHK	Rp7.500,-
2.	Makan dan minum kegiatan rapat : a. makan b. snack	porsi/ kotak pori/ kotak	Rp25.000,- Rp15.000,-
3.	Makan dan minum tamu : a. makan b. snack	porsi/ kotak pori/ kotak	Rp30.000,- Rp15.000,-
4.	Snack/camilan sosialisasi, bimtek, pelatihan dan sejenisnya	orang/ pori	Rp15.000,-
5.	Makan siang/malam sosialisasi, bimtek, pelatihan dan sejenisnya	orang/ pori	Rp25.000,-

Keterangan:

Snack/camilan harian diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling banyak per Aparatur Pemerintah Desa 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack Aparatur Pemerintah Desa.

I. PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi		Maksimal 10% dari jumlah Belanja Operasional Pemerintahan Desa

Keterangan :

Contoh Perhitungan maksimal 10% dari Belanja Operasional Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan 1 (satu) Rp385.775.000,-
kepala desa, sekretaris desa dan tahun
perangkat desa lainnya
- b. Tunjangan dan operasional BPD 1 (satu) Rp122.267.500,-
tahun

Jumlah Rp508.042.500,-
= 10% x Rp508.042.500,-
= Rp50.804.250,-

(batas maksimal penganggaran biaya perjalanan dinas luar dan dalam provinsi)

J. HONORARIUM TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Honorarium Panitia Penyusun Buku Profil Desa (maksimal 7 orang) a. penanggungjawab (Kepala Desa) b. ketua (Sekretaris Desa) c. sekretaris (Kepala Seksi/Kepala Urusan) d. anggota (Kepala Urusan/Kepala Seksi Orang)	OK OK OK OK	Rp225.000,- Rp200.000,- Rp175.000,- Rp150.000,-
2.	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (maksimal 5 orang) a. ketua b. sekretaris c. anggota	OK OK OK	Rp350.000,- Rp300.000,- Rp250.000,-
3.	Honorarium Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (maksimal 7 orang) a. ketua b. sekretaris c. Anggota	OK OK OK	Rp350.000,- Rp300.000,- Rp250.000,-
4.	Honorarium Panitia Pemilihan BPD Pengganti Antar Waktu (maksimal 5 orang) a. ketua b. sekretaris c. anggota	OK OK OK	Rp250.000,- Rp200.000,- Rp150.000,-

5.	Honorarium Panitia Seleksi Perangkat Desa Dan Staf Pada Pemerintah Desa (maksimal 5 orang) a. ketua b. sekretaris c. anggota	OK OK OK	Rp350.000,- Rp300.000,- Rp250.000,-
6.	Honorarium Panitia Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD) (maksimal 7 orang) a. ketua b. sekretaris c. anggota	OK OK OK	Rp200.000,- Rp150.000,- Rp100.000,-
7.	Honorarium Tim Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) a. ketua b. sekretaris c. anggota (maksimal 5 orang)	OK OK OK	Rp500.000,- Rp400.000,- Rp300.000,-
8.	Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah a. ketua b. wakil ketua c. sekretaris d. anggota (paling kurang 4 orang atau paling banyak 8 orang)	OK OK OK OK	Rp500.000,- Rp400.000,- Rp350.000,- Rp300.000,-

Keterangan:

1. Honorarium tim/kepanitiaan diberikan kepada unsur dari Aparatur Pemerintahan Desa dan unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlibat dan berkontribusi langsung dalam proses/pencapaian *output* kegiatan.
2. Honorarium Tim Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dibayarkan per tahun.

Susunan keanggotaan Tim berasal dari unsur yaitu :

- a. Ketua adalah Kepala Desa
- b. Sekretaris adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa
- c. Anggota adalah perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa yakni RT (Rukun Tetangga).

Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan registrasi SPPFBT;
- b. dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap objek bidang tanah yang diajukan untuk mendapatkan registrasi SPPFBT; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam pengambilan keputusan untuk diberikan/ atau tidak diberikan registrasi SPPFBT sesuai pengajuan dari pemohon berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan.

(Pasal 8 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2022 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kabupaten Tabalong).

K. PENDATAAN/PEMUTAKHIRAN DATA DI TINGKAT DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Pendataan dan Pemutakhiran		
	a. biaya pendataan/pemutakhiran	KK	Rp5.000,-
	b. biaya fotocopy instrument pendataan/pumutakhiran	lembar	Rp300,-
	c. biaya enty data	KK	Rp2.000,-

L. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Biaya PMT untuk kegiatan Posyandu Bidang Kesehatan	porsi	Rp15.000,-
2.	Biaya Operasional Dan Makanan Lengkap Siap Santap Tinggi Kalori Dan Tinggi Protein Dengan Memperhatikan Gizi Seimbang Untuk Stunting	paket	Rp35.000,-

M. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	OP	Rp3.500.000,-
2.	PDH Warna Khaki Aparatur Pemerintah Desa	OP	Rp600.000,-
3.	PDH Batik Khas Daerah/Sasirangan Aparatur Pemerintahan Desa	OP	Rp350.000,-
4.	PDH Kemeja Putih Untuk Aparatur Pemerintah Desa	OP	Rp600.000,-

Keterangan:

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa merupakan satu kesatuan dengan perlengkapan dan atribut dianggarkan maksimal 2 (dua) kali dalam masa periode jabatan.
2. PDH Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 4 tidak dianggarkan setiap tahun dan PDH sebagaimana dimaksud angka 3 dapat dianggarkan untuk kegiatan Hari Jadi Kabupaten.

N. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

1. Kendaraan roda dua:

Jenis Kendaraan	Bebek, Trail, Scooter
Kapasitas Mesin Maksimal	125 cc
Kondisi	baru
Jenis Transmisi	Otomatis/Manual

Keterangan :

Pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda berupa label aset desa dan register aset desa.

2. Kendaraan roda tiga:

Jenis Kendaraan	Roda 3 (tiga)
Kapasitas Mesin Maksimal	300 cc
Kondisi	baru
Jenis Transmisi	Manual

Keterangan:

Pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. logo Pemerintah Daerah dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm, sedangkan logo Tabalong Smart menyesuaikan;
- b. posisi pada sisi kanan dan kiri bak kendaraan; dan
- c. daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.

3. Kendaraan roda empat:

a. Mobil Dinas Desa:

Jenis Kendaraan	Minibus
Warna	Hitam
Kapasitas Mesin Maksimal	1.500 cc
Jumlah Silinder	4 Silinder
Jenis Bahan Bakar	Bensin
Kondisi Kendaraan	baru
Jenis Transmisi	Manual
Jumlah Kursi Duduk Penumpang Minimal	7 Orang Dewasa

Keterangan:

Pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) gambar logo Pemerintah Daerah dan logo Tabalong Smart, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) logo Pemerintah Daerah dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm, sedangkan logo Tabalong Smart menyesuaikan;
 - b) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
 - c) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.
- 2) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) warna huruf putih/ menyesuaikan dengan warna kendaraan;
 - b) ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "arial narrow bold";
 - c) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil; dan
 - d) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.

b. Mobil Ambulance Desa:

Jenis Kendaraan	Van
Warna	Putih/Silver
Kapasitas Mesin Maksimal	1.500 cc
Jumlah Silinder	4 Silinder
Jenis Bahan Bakar	Bensin
Kondisi Mobil	baru
Jenis Transmisi	Manual

Keterangan :

Pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) gambar logo Pemerintah Daerah dan logo Tabalong Smart, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) logo Pemerintah Daerah dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm, sedangkan logo Tabalong Smart menyesuaikan;
 - b) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
 - c) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.
- 2) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil ambulance dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) warna huruf merah untuk tulisan "Ambulance" dan warna hitam untuk tulisan lainnya;
 - b) ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "arial narrow bold";
 - c) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil;
 - d) memuat nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
 - e) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.

c. Mobil Sampah/Operasional Desa:

Jenis Kendaraan	Pick Up
Kapasitas Mesin Maksimal	1.500 cc
Jumlah Silinder	4 Silinder
Jenis Bahan Bakar	Bensin/Solar
Kondisi	Baru
Jenis Transmisi	Manual

Keterangan:

Pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) gambar logo Pemerintah Daerah dan logo Tabalong Smart, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) logo Pemerintah Daerah dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm, sedangkan logo Tabalong Smart menyesuaikan;
 - b) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
 - c) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.
- 2) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil sampah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) warna huruf menyesuaikan dengan warna kendaraan;
 - b) ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
 - c) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil; dan
 - d) Daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.
- d. Mobil Dinas dan Mobil *Ambulance* Desa sesuai huruf a) dan b) diatas bisa dikecualikan bagi Desa Panaan, Desa Dambung Raya, Desa Hegar Manah, Desa Salikung dan Desa Sungai Kumap yang disesuaikan dengan kondisi desa setempat yaitu kendaraan roda empat jenis double gardan.
- e. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan spesifikasi dan tidak boleh melebihi harga yang tertera dalam katalog elektronik.
- f. Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar merah.

O. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit/th	Rp15.000.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 3	unit/th	Rp5.000.000,-
3.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor)	unit/th	Rp3.500.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 Jenis Double Gardan	unit/th	Rp 20.000.000,-

Keterangan :




Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sudah termasuk BBM, pemeliharaan rutin dan pajak tahunan.




P. SEWA SERVER/LANGGANAN CLOUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/ BESARAN
1.	Biaya Sewa Server/Langgan Cloud	paket/ tahun	Rp3.000.000,-

Keterangan:

- OB = Orang per bulan
- OK = Orang per kegiatan
- OHP = Orang per hari per paket
- OJ = Orang per jam
- OP = Orang per paket

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI